



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	27 (Dua Puluh Tujuh)
Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI.
Hari, Tanggal	:	Senin, 8 Juli 2024
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A./ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
A c a r a	:	1. Pembahasan mengenai Rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran. (<i>Prefential Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran</i>) 2. Lain-lain.
Hadir	:	1. 27 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Perdagangan RI, Sdr. Zulkifli Hasan; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya pada Pukul 15.13 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 8 Juli 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Perdagangan RI terkait dengan Rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (*Preferential Trade Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Islamic Republic of Iran*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui pembahasan terhadap Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (*Preferential Trade Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Islamic Republic of Iran*) melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres).
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk dapat memperhatikan aspek geopolitik, hambatan bersifat Tarif dan Non Tarif serta Besaran Pasar (*Market Size*) kedua belah pihak di dalam Perjanjian Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 16.27 WIB.

MENTERI PERDAGANGAN RI

Ttd.

ZULKIFLI HASAN

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

A-103

